



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 28 . TAHUN 2011

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan revisi terhadap standar biaya perjalanan dinas dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan dokter/rujukan penguji kesehatan pegawai negeri sipil yang ditunjuk.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
8. Biaya transportasi pegawai adalah biaya transportasi yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
10. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
11. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas keluar Provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip diberikan oleh Bupati;
 - b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam Provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip diberikan oleh Wakil Bupati;
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, persetujuan prinsip diberikan oleh Sekretaris Daerah bagi pimpinan SKPD, dan oleh pimpinan SKPD bagi staf.
 - d. bagi SKPD Kantor Latihan Kerja dan Kecamatan, persetujuan prinsip untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diberikan oleh pimpinan SKPD masing-masing.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. bagi pimpinan SKPD, surat perintah tugas ditandatangani oleh pejabat yang memberikan persetujuan prinsip;

- b. bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan staf, surat perintah tugas ditandatangani oleh pimpinan SKPD masing-masing.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berada ditempat, maka persetujuan prinsip dan surat perintah tugas diberikan oleh pejabat lain sesuai jenjang jabatan.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. Uang Harian yang meliputi Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokal;
 - b. Biaya Transportasi Pegawai;
 - c. Biaya Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas, dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebelum melaksanakan perjalanan dinas sedangkan biaya transportasi udara dibayarkan 60% dari estimasi biaya tiket sebelum berangkat.
- (2) Biaya lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas pergi dan pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV huruf C Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD dan Eselon III pada SKPD yang secara nyata memiliki fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat), diberikan biaya transportasi dengan moda transportasi penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat).

Pasal 6

- (1) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi-pulang) di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Standar biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut :
 - a. kendaraan sampai dengan 1.500 CC, 1 liter BBM jarak tempuh 7 (tujuh) kilometer;
 - b. kendaraan sampai dengan 1.800 CC, 1 liter BBM jarak tempuh 6 (enam) kilometer;
 - c. kendaraan sampai dengan 2.000 CC, 1 liter BBM jarak tempuh 5 (lima) kilometer;
 - d. kendaraan sampai dengan 3.200 CC, 1 liter BBM jarak tempuh 4 (empat) kilometer.
- (3) Perbandingan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas (pergi-pulang) di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan kapasitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara paling lama 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Limbong 3 (tiga) hari, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi 5 (lima) hari atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang, dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV huruf A Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan bagi SKPD kecamatan yang dari ibukota kecamatan berjarak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer diberikan biaya perjalanan dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV huruf B Peraturan Bupati ini.

- (3) Perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan bagi SKPD kecamatan yang dari ibukota kecamatan berjarak lebih dari 10 (sepuluh) kilometer diberikan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai pengeluaran riil ditambah uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara selain yang diatur dalam Pasal 4, diberikan biaya transportasi kendaraan umum dan dibayarkan secara lumpsum sebelum berangkat.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan hanya diberikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan, tidak diberikan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk:
 - a. perjalanan dinas keluar negeri;
 - b. perjalanan pindah;
 - c. biaya pemulangan pegawai negeri sipil yang pensiun; dan
 - d. perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Bagi pegawai negeri sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI**

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF & PTT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
3	R I A U	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
5	J A M B I	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
8	LAMPUNG	Rp 375,000	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000
9	BENGKULU	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
11	BANTEN	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
12	JAWA BARAT	Rp 425,000	Rp 415,000	Rp 405,000	Rp 395,000
13	D.K.I JAKARTA	Rp 525,000	Rp 515,000	Rp 505,000	Rp 495,000
14	JAWA TENGAH	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 415,000	Rp 405,000	Rp 395,000	Rp 385,000
16	JAWA TIMUR	Rp 405,000	Rp 395,000	Rp 385,000	Rp 375,000
17	B A L I	Rp 475,000	Rp 465,000	Rp 455,000	Rp 445,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 435,000	Rp 425,000	Rp 415,000	Rp 405,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 415,000	Rp 405,000	Rp 395,000	Rp 385,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 425,000	Rp 415,000	Rp 405,000	Rp 395,000
24	SULAWESI UTARA	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
25	GORONTALO	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
26	SULAWESI BARAT	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 425,000	Rp 415,000	Rp 405,000	Rp 395,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 375,000	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000
30	MALUKU	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000	Rp 325,000
31	MALUKU UTARA	Rp 365,000	Rp 355,000	Rp 345,000	Rp 335,000
32	P A P U A	Rp 575,000	Rp 565,000	Rp 555,000	Rp 545,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 475,000	Rp 465,000	Rp 455,000	Rp 445,000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

BUPATI LUWU UTARA
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SATUAN BIAYA HOTEL / PENGINAPAN

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)			
		BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II (Bintang Empat Standar)	ESELON III (Bintang Tiga Standar)	ESELON IV (Bintang Dua Standar)	STAF & PTT (Bintang Satu Standar)
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000
3	R I A U	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 300,000	Rp 250,000
5	J A M B I	Rp 600,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 250,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000
8	LAMPUNG	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000
9	BENGKULU	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000
11	BANTEN	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000
12	JAWA BARAT	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 350,000
13	D.K.I JAKARTA	Rp 800,000	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 400,000
14	JAWA TENGAH	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000
16	JAWA TIMUR	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 350,000
17	B A L I	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 800,000	Rp 550,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 300,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 250,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 300,000
24	SULAWESI UTARA	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 300,000
25	GORONTALO	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 250,000
26	SULAWESI BARAT	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 250,000
27	KOTA MAKASSAR	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 300,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 250,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000
30	MALUKU	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 250,000
31	MALUKU UTARA	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 250,000
32	P A P U A	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 350,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**TABEL JARAK TEMPUH DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
BERDASARKAN KAPASITAS KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**

NO	DAERAH TUJUAN	JARAK (KILO METER)	PULANG - PERGI (KILO METER)	KAPASITAS KENDARAAN			
				s/d 1.500 CC (Liter)	s/d 1.800 CC (Liter)	s/d 2.000 CC (Liter)	s/d 3.200 CC (Liter)
1	MAKASSAR	454	908	130	151	182	227
2	MAROS	424	848	121	141	170	212
3	PANGKEP	403	806	115	134	161	202
4	BARRU	352	704	101	117	141	176
5	PARE - PARE	229	458	65	76	92	115
6	PINRANG	272	544	78	91	109	136
7	SIDRAP	266	532	76	89	106	133
8	SENGKANG	384	768	110	128	154	192
9	SOPPENG	386	772	110	129	154	193
10	BONE	480	960	137	160	192	240
11	SINJAI	674	1,348	193	225	270	337
12	GOWA	465	930	133	155	186	233
13	TAKALAR	499	998	143	166	200	250
14	JENEPONTO	545	1,090	156	182	218	273
15	BANTAENG	174	348	50	58	70	87
16	BULUKUMBA	507	1,014	145	169	203	254
17	SELAYAR	507	1,014	145	169	203	254
18	TATOR	144	288	41	48	58	72
19	ENREKANG	218	436	62	73	87	109
20	MALILI	130	260	37	40	52	65
21	KOTA PALOPO	64	128	18	21	26	32
22	LUWU	124	248	35	41	50	62
23	SOROWAKO	170	340	49	57	68	85
24	KOLAKA (SULTRA)	400	800	114	133	160	200
25	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	400	800	114	133	160	200
26	MAMUJU (SULBAR)	450	900	129	150	180	225

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Sekda		
2. Asisten III		
3. Kabag Organisasi		
4. Kasubag		

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUMPSSUM / HARI				
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V
		KEC. BONE-BONE, BAEBUNTA, SABBANG, SUKAMAJU & MAPPEDECENG	KEC. MALANGKE & MAL-BAR	KEC. MASAMBA (DESA PINCARA, LERO, SUMILLIN, SEPAKAT, LANTANG TALLANG & TORADDA)	KEC. LIMBONG	KEC. SEKO & RAMPI
1	BUPATI & KETUA DPRD	Rp 300,000	Rp 325,000	Rp 200,000	Rp 600,000	Rp 750,000
2	WAKIL BUPATI & WAKIL KETUA DPRD	Rp 250,000	Rp 275,000	Rp 150,000	Rp 550,000	Rp 700,000
3	ESELON II A & ANGGOTA DPRD	Rp 225,000	Rp 260,000	Rp 130,000	Rp 500,000	Rp 675,000
4	ESELON II B	Rp 200,000	Rp 250,000	Rp 125,000	Rp 450,000	Rp 650,000
5	ESELON III	Rp 175,000	Rp 200,000	Rp 110,000	Rp 400,000	Rp 600,000
6	ESELON IV	Rp 150,000	Rp 175,000	Rp 100,000	Rp 350,000	Rp 550,000
7	STAF & PTT	Rp 100,000	Rp 125,000	Rp 75,000	Rp 250,000	Rp 450,000

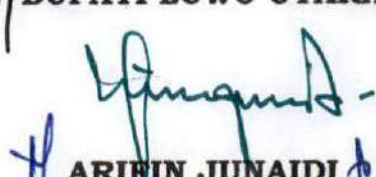
B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSSUM / HARI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
		KEC. BONE-BONE, SABBANG, SUKAMAJU & MAPPEDECENG	KEC. BAEBUNTA, MALANGKE & MAL-BAR	KEC. MASAMBA	KEC. LIMBONG, SEKO & RAMPI
1	CAMAT	Rp 65,000	Rp 65,000	Rp 65,000	Rp 75,000
2	SEKCAM	Rp 45,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 60,000
3	KASI / KASUBAG	Rp 40,000	Rp 45,000	Rp 45,000	Rp 50,000
4	STAF & PTT	Rp 35,000	Rp 35,000	Rp 35,000	Rp 40,000

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN LUWU, KOTA PALOPO DAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	KAB / KOTA	JUMLAH
1	LUWU	Rp 200,000
2	PALOPO	Rp 185,000
3	LUWU TIMUR	Rp 200,000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2011
 TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD & PEJABAT ESELON II

NO	URAIAN	ORANG / HARI	
		DI LUAR WILAYAH KAB. LUWU UTARA DALAM PROV. SUL-SEL	DI LUAR PROV. SUL- SEL
1	Bupati / Wakil Bupati, Ketua / Wakil Ketua DPRD & Pejabat Eselon II.a	Rp 250,000	Rp 300,000
2	Anggota DPRD & Pejabat Eselon II.b	Rp 200,000	Rp 250,000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

 BUPATI LUWU UTARA, 


 ARIFIN JUNAIDI 